

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Alfian Lains, Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru, Prisma, Jakarta, 1985.
- Arif Nasution (ed), Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Bagir Manan, Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Daerah yang Berkelanjutan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 13 Mei 2000.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Emil Salim, Otonomi Daerah dan Masalahnya, dalam buku Harian Suara Pembaruan, Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- H.A.W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- J. Wajong, Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah, Jakarta, 1975.
- Josef Riwu Kaho, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Sebagai Tanggap Terhadap Aspirasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi, Usahawan No. 04 Th. XXIX April 2000.
- Koswara, M, Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Yayasan Pariba, Jakarta, 2001.
- Krisna D. Darumusrti dan Uumbu Rauta, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- M. Solly Lubis, Filsafat Hukum dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002.
- Pamudji, S., "Pembinaan Perkotaan di Indonesia", Ichtiar, Jakarta, 1980.
- R.D.H. Koesoemahatmadja, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Riwu Kaho, Josef, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Sebagai Tanggap Terhadap Aspirasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi, Usahawan No. 04 Th. XXIX April 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Galia Indonesia, Jakarta : 1983, halaman 7.
- S.L.S. Danuredjo, Otonomi di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan, Laras, Jakarta, 1967.
- Saleh Syariff, Otonomi dan Daerah Otonom, Endang, Jakarta, 1953.

Sarundajang, Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara Sebuah Pengantar, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke Tiga, Penerbit UI Jakarta, 1986.

Sujamto, Norma & Etika Pengawasan : Sinar Grafika, Jakarta, 1987.

Syariff, Saleh, Otonomi dan Daerah Otonom, Endang, Jakarta, 1953.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Wajong, J. Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah, Jakarta, 1975.

Wajong, J., "Administrasi Keuangan Daerah" (Cetakan IV), Ichtiar, Jakarta, 1975.

Y.W. Sunindhia, Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

**Peraturan perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar 1945 beserta Perubahan

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/2000 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.